

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan separatisme merupakan masalah yang telah lama terjadi di berbagai belahan dunia dan terjadi dikarenakan berbagai alasan. Pada bagian latar belakang ini akan dipaparkan beberapa permasalahan yang mendasari penulis dalam menyusun penelitian ini. Pertama adalah persoalan tentang separatisme yang telah lama dan menjadi ancaman yang sangat serius di seluruh dunia. Kedua, persoalan separatisme yang ada di Indonesia dimana semenjak merdeka telah banyak ujian dalam bentuk gerakan separatis di Indonesia. Ketiga, yaitu permasalahan separatisme di Papua yang masih sering mengemuka dalam berbagai medium baik di kancah nasional maupun internasional. Terakhir, berkaitan dengan kebijakan yang telah diambil dalam rangka penanganan separatisme di Papua dan bagaimana efektifitas dari pendekatan tersebut.

Separatisme merupakan satu gerakan yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan satu kepentingan tertentu baik dari tingkatan rendah sampai tingkat kenegaraan. Menurut Harris (2009) gerakan separatis kebanyakan memperjuangkan kemerdekaan atas satu daerah atau wilayah tertentu. Selain itu pendapat lain dikemukakan oleh Pavkovic dan Radan (2013) yang menyatakan bahwa separatisme merupakan satu kesatuan aksi untuk melakukan sebuah suksesi atas kepemimpinan yang ada pada satu negara. Sehingga berdasarkan tujuan separatisme yang demikian, separatisme merupakan sebuah ancaman nyata bagi setiap negara dan bangsa di seluruh dunia. Separatisme adalah ancaman serius yang akan mengerus persatuan dan kesatuan banyak negara tak terkecuali di Indonesia.

Adanya gerakan separatisme ini, tumbuh dikarenakan berbagai alasan seperti permasalahan seperti ketimpangan, ketidakadilan, dan adanya pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk merusak persatuan. Menurut Cipto (2016) terdapat berbagai hal yang membuat Asia khususnya Indonesia menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya gerakan-gerakan separatisme. Beberapa penyebab terjadinya diantaranya adalah tajamnya perbedaan sosio-kultural dan pembangunan ekonomi yang masih berjalan lambat. Selain itu, adanya sisa-sisa sistem non-demokratis dan jejak kolonialisme, serta tradisi feodal yang masih kental juga turut andil dalam mempertahankan separatisme untuk terus berkembang (Pudjiastuti, 2002).

Indonesia pada dasarnya telah banyak memiliki pengalaman dalam mengelola dan mempertahankan diri atas adanya ancaman separatisme. Tercatat telah banyak gerakan separatis yang turut mewarnai sejarah Indonesia sejak Indonesia pertama kali mendeklarasikan kemerdekaan. Beberapa aksi-aksi separatisme yang paling terkenal diantaranya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), DI/TII, Republik Maluku Selatan, dan Organisasi Papua Merdeka. Haris (1999) menyebutkan bahwa krisis ekonomi, ketimpangan dan ketidakadilan antara pusat dan daerah adalah pemicu utama gerakan separatis di Indonesia. Secara lebih jauh, Sukma (2005) menjelaskan bahwa terjadinya konflik dan separatisme di Indonesia menemui masa puncak dengan jumlah yang cukup banyak disaat runtuhnya orde baru. Pada masa awal reformasi, pembangunan ekonomi memang ada di masa yang cukup sulit karena dunia tengah ada dalam jeratan krisis ekonomi 1998. Selain itu, pembangunan yang tidak terlalu merata di seluruh wilayah Indonesia juga mendukung banyak daerah untuk mencoba memerdekakan dirinya.

Dari sekian banyak gerakan separatis yang terjadi di Indonesia, sebagian besar telah terselesaikan atau minimal tidak lagi mengemuka.

Gerakan separatisme di Papua adalah gerakan yang bertujuan untuk membentuk sebuah negara Papua yang merdeka dan telah dimulai semenjak dikembalikannya Papua kepada Indonesia melalui Pepera di tahun 1969. Jika merunut dari sejarah, perjuangan untuk mengembalikan Papua kepada Indonesia adalah perjuangan yang panjang. Dimulai ketika Indonesia melakukan upaya perundingan di Konferensi Meja Bundar dan diakhiri oleh perjanjian New York pada tahun 1962 (Yambeyapdi, 2019). Perjanjian New York adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang diinisiasi oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri ketegangan di Papua.

Banyak pendapat yang menjelaskan sejarah gerakan Papua merdeka, banyak yang menilai adanya kekecewaan dikarenakan sejarah bergabungnya Papua yang belum terlalu terang sampai saat ini. Bahkan beberapa ahli seperti Simpson (2004) yang menuturkan bahwa pertikaian di Papua adalah akibat dari integrasi Papua yang tidak dilakukan dengan jalur Penentuan Pendapat seperti yang telah dicanangkan pada tahun 1962. Selain itu, faktor pengaruh dari dunia internasional juga kerap mengemuka dalam permasalahan Papua. Gerakan separatis di Papua sampai saat ini terus tumbuh dan berkembang, bahkan gerakan ini terus berevolusi dengan beragam upaya selain perjuangan secara fisik dan senjata. Hal ini sejalan dengan temuan Paramitha (2019) yang mendapati bahwa gerakan separatisme Papua mulai merubah pola gerakannya menjadi gerakan politik, setelah sebelumnya hanya menapaki pertempuran fisik sebagai satu-satunya upaya.

Salah satu upaya politik yang kerap dilakukan oleh gerakan separatis Papua adalah dengan melakukan propaganda. Propaganda adalah satu kegiatan yang biasanya dalam koridor komunikasi dengan tujuan mendukung tujuan dari pihak tertentu. Heryanto dan Rumaru (2013) menjelaskan propaganda sebagai sebuah upaya untuk menghimpun pengaruh atau

menyemai satu ajaran tertentu. Sebagai sebuah upaya untuk menghimpun dukungan dan pengaruh, propaganda sangat erat dengan perjuangan politik dan gerakan-gerakan separatisme. Hal ini tidak terkecuali dengan usaha yang dilakukan oleh gerakan separatisme Papua yang mulai sering menggunakan propaganda sebagai jalan untuk memperjuangkan tujuannya. Menurut Al Rahab (2016) pada dasarnya upaya politik telah mulai dikembangkan oleh gerakan Papua merdeka semenjak reformasi tahun 1998. Gerakan politik yang salah satunya dengan melakukan propaganda adalah gerakan yang meneruskan perjuangan secara fisik yang telah ada semenjak tahun 1960 an. Propaganda dipakai oleh simpatisan pro kemerdekaan Papua dikarenakan upaya fisik dan konflik terbuka dinilai tidak terlalu efektif dalam mencapai tujuan (Pamungkas, 2020).

Transformasi pergerakan pro Papua merdeka yang mulai banyak melakukan propaganda dapat terlihat dari beberapa kejadian yang menyangkut masyarakat Papua pada beberapa tahun belakangan. sebagai contoh, pada tahun 2019 terjadi sebuah gerakan masa besar-besaran di tanah Papua yang dipicu oleh adanya ujaran bernada rasis di asrama mahasiswa Papua Surabaya. Ujaran rasis ini kemudian direproduksi dan disiarkan sehingga memicu gerakan masa besar yang terjadi di beberapa kota di Papua (Devita dan Yoedtadi, 2020). Gelombang besar protes atas kejadian yang terjadi di Surabaya tersebut pada akhirnya meninggalkan kerusakan dan kerugian yang serius baik secara materii maupun imateriil. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari upaya-upaya propaganda tersebut membutuhkan sebuah penanganan yang serius.

Selama ini, pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan Papua adalah pendekatan Pembangunan. Pendekatan ini dilakukan setelah beberapa dekade lalu pendekatan keamanan

dan militer kerap dilancarkan untuk menjaga stabilitas Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan pemerintah Indonesia telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diharapkan mampu untuk memangkas jurang ekonomi di tanah Papua (Elisabeth, 2016). Hal ini masih ditambah dengan banyaknya alokasi dana dari pemerintah pusat untuk Papua sesuai dengan amanat otonomi khusus yang melekat sejak 2002 seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Secara umum, besaran dana transfer pusat kepada Papua berpengaruh sebesar 60 persen dari keseluruhan postur APBD Papua (kontan.co.id, 2020). Sehingga jika melihat beberapa indikator tersebut, tidak bisa serta merta dikatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak serius dalam mengelola Papua. Selain itu, pembangunan berkelanjutan menjadi penting untuk dikaji dalam mencapai perdamaian di Papua.

Melihat pembangunan dan perhatian Pemerintah Pusat terhadap Papua yang cukup besar menjadi sebuah cerminan betapa seriusnya Pemerintah untuk merangkul Papua. Namun, apabila melihat intensifnya propaganda dan permasalahan yang terjadi di Papua, patut menjadi pertanyaan apakah pendekatan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan sudah efektif dilakukan. Propaganda serta berbagai yang kerap terjadi di Papua bahkan seiring sejalan dengan bertumbuhnya perhatian pusat kepada Papua. Mencermati beberapa permasalahan di atas, penulis bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran dan usulan solusi atas persoalan Papua yang terjadi. Penelitian ini akan mengangkat **Dialektika Pembangunan Berkelanjutan Untuk Perdamaian Di Tanah Papua** untuk meningkatkan stabilitas di Papua dalam rangka menjamin keamanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai judul pada penelitian yang akan dikerjakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua?
2. Apa saja hambatan yang selama ini ada dalam proses pembangunan di Papua?
3. Bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat mendorong perdamaian di Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merangkai tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Memberikan deskripsi terhadap pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia di tanah Papua.
2. Memberikan penjelasan tentang hambatan yang selama ini menjadi halangan dalam pembangunan di Papua.
3. Menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan dalam mendorong perdamaian di Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini akan dijabarkan menjadi dua jenis, pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua merupakan manfaat praktis. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini.

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti atau akademisi yang lain dalam mempelajari tentang pembangunan berkelanjutan di tanah Papua dan hambatan yang selama ini ada.
2. Memberikan pandangan yang baru dalam melihat pembangunan sebagai aspek penunjang resolusi konflik dan peletakan nilai dasar perdamaian.
3. Diharapkan penelitian ini menambahkan referensi ilmiah tentang pendekatan pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia di Papua.
4. Menambahkan literatur tentang konflik di Papua dan penanganan yang mungkin dilakukan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan sumber informasi terkait pembangunan berkelanjutan di tanah Papua yang selama ini dilakukan. Masyarakat nantinya dapat mengambil sudut pandang yang lebih luas tentang bagaimana halangan atas pembangunan di produksi dan direproduksi. Selain itu, masyarakat juga dapat menilai atas langkah dan pendekatan pemerintah Indonesia yang telah dilakukan selama ini di tanah Papua.

2. Bagi pengambil kebijakan, menjadi sebuah kajian dengan pertimbangan empiris terkait kebijakan dalam menghadapi hambatan yang selama ini merintang pembangunan di Papua dan menyempurnakan pendekatan pembangunan yang selama ini telah dilakukan dalam rangka menghalau propaganda.
3. Bagi rekonsiliator konflik, dapat menjadi sebuah referensi dalam mempertimbangkan penerapan pendekatan pembangunan untuk proses rekonsiliasi konflik yang tengah berlangsung.
4. Bagi pendidik: penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar dalam pembahasan mengenai topik pembangunan berkelanjutan yang dilakukan di Papua.
5. Bagi diplomat: dapat menjadi sebuah referensi untuk memasukan lebih jauh lagi untuk dapat menyelesaikan permasalahan Papua melalui jalur diplomasi.